

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA

Hubungan antara pemerintah Indonesia dengan Australia sudah lama terjalin dan pertama kali dilakukan setelah paska kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan sudah diakui oleh beberapa negara di dunia bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan makmur tidak lagi sebagai negara yang dijajah oleh Belanda maupun Jepang. Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia dibuka pada tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha ad Interim yang untuk sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra. Dr. Oesman kemudian kembali ke Indonesia tanggal 5 Juli 1950 dan digantikan oleh Oetojo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh. Kantor Perwakilan RI di Canberra pada saat itu berpindah-pindah, dan baru pada bulan Agustus 1971 menempati Kantor Permanen yang ada saat ini di daerah Yarralumla, yang merupakan daerah lingkungan perwakilan-perwakilan asing di Canberra (kemenlu, n.d.).

A. Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun tetapi di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Bahkan kedua negara seringkali digambarkan seperti *roller coaster* yakni naik secara perlahan namun turun dengan sangat tajam menjadi bagian dari sejarah

hubungan kedua negara. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan diantara kedua negara dan bangsa yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan berbagai masalah yang selalu mewarnai hubungan kedua negara.

Kondisi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia kerap mengalami pasang surut hubungan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor geografis yang cukup dekat sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam segi teritorial, faktor kultural antara ke dua negara yang berbeda dari segi norma, nilai, agama, serta kebiasaan, dan yang paling utama adalah dari faktor kepentingan nasional. Sebelum terjadinya perang dunia ke II, Australia tidak menaruh perhatian kepada Indonesia mengingat negara induknya yaitu Kerajaan Inggris memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Belanda. Pasca perang dunia ke II, Pemerintah serta rakyat Australia mendengar perjuangan rakyat Indonesia melalui radio. Sehingga merekapun menunjukkan rasa simpati dan dukungannya. Bukti dukungan moral Pemerintah Australia dan rakyatnya adalah adanya kritik terhadap Belanda saat melakukan agresi militer. Sikap konsisten Australia mendukung perjuangan Indonesia selama berlangsungnya revolusi fisik tersebut tampak dalam reaksinya ketika Belanda melancarkan dua kali agresi militernya. Australia berperan aktif ketika Indonesia mendapatkan agresi militer I dari Belanda. Pemerintah Australia kemudian bertindak dengan melaporkan dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tindakan militer Belanda kepada Indonesia (Saraswati, 2015)

Hubungan kenegaraan Australia dengan Indonesia diawali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda paling dirasakan antara 1942-1950. Federasi Pekerja Pasisir Australia (WWF) mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Hal tersebut mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pekerja di pelabuhan utama lainnya di Australia termasuk Sydney, Melbourne dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda kemudian memboikot semua transportasi, toko, dan pengisian darat. Embargo terus berlangsung sampai tahun 1948. Tiga puluh satu serikat pekerja Australia dan empat serikat pekerja Asia secara langsung menghentikan 559 kapal yang seharusnya adalah persediaan bagi usaha Belanda Maret 1946, misalnya, 1000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia masih tetap di Australia (ISTIQUAMAH, 2014).

Tahun 1950 sampai dengan tahun 1962 hubungan Australia-Indonesia mengalami penurunan. Mulai dari masalah Irian Barat hingga masalah Timor Leste. Pada tahun 1991 pada masa pemerintahan Paul Keating dari partai buruh, dianggap sebagai masa dimana hubungan bilateral Indonesia-Australia berada pada titik terbaik. Pada masa pemerintahannya, Keating menaruh perhatian yang mendalam terhadap negara-negara Asia utamanya Indonesia. Keating menganggap Indonesia penting untuk mencapai integrasi ekonomi Australia dengan negara-negara Asia. Secara khusus PM Paul Keating menyatakan bahwa *“No other country is more important to Australia than Indonesia”* (Bakti, Ikrar Nusa, 2008).

Perkataan tersebut menunjukkan hubungan Australia-Indonesia yang begitu erat pada tahun 1991-1996. Kemudian pada masa pemerintahan John Howard tahun 1996 hubungan Australia-Indonesia penuh dengan kecurigaan karena pada saat itu Australia dianggap mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia (dkk, 2005).

Di Jakarta, Menlu Indonesia memanggil Duta Australia dan di Canberra, Duta Indonesia mengajukan surat protes kepada Menlu Australia berkaitan dengan artikel Jenkins. Tanggal 12 April 1986, Menristek Habibie membatalkan secara sepihak rencana kunjungannya ke Australia. Tidak lama kemudian, Indonesia menolak perpanjangan visa masuk jurnalis Australia dan melarang masuk sembilan orang jurnalis yang ingin meliput kunjungan Presiden AS, Ronald Reagan, ke Bali. Hubungan semakin memburuk ketika Indonesia secara sepihak menunda perundingan mengenai batas landas kontinen di Celah Timor. Menghadapi sikap Indonesia, Australia tidak tinggal diam. Tanggal 21 April 1986, secara sepihak Australia mencabut hak berlabuh nelayan tradisional Indonesia pada pulau-pulau di sekitar Kepulauan Ashmore dan Laut Timor yang menjadi wilayah Australia. Tetapi hari berikutnya, Indonesia menolak visa masuk bagi wisatawan Australia. Akibatnya, 180 orang turis asal Australia tertahan di Bandara Ngurah Rai Bali dan bahkan sebagian ada yang terpaksa berangkat ke tempat tujuan lain atau kembali ke Australia. Di Bandara Polonia, Medan, empat turis Australia dipaksa kembali ke Kuala Lumpur dan seorang pilot Australia yang menerbangkan pesawat Australia dari Colombo, Sri Lanka, dan melakukan transit di Medan menghadapi interogasi ketat sebelum diijinkan menginap semalam. Menghadapi pencabutan visa

masuk ini, Australia melakukan protes diplomatik keras melalui Dubes Australia di Jakarta. Di Canberra, Menlu Australia memanggil Dubes Indonesia untuk menjelaskan kasus ini. Karena protes ini, Indonesia melunakkan sikap, menarik kembali tindakan pencabutan visa bagi turis Australia. Kasus ini, dikenal luas sebagai Jenkins Affair, telah mengakibatkan hubungan bilateral Indonesia-Australia memasuki tahapan yang paling dingin. Implikasinya mempengaruhi berbagai aspek hubungan. Namun demikian, pemerintah kedua Negara menyadari betul bahwa meskipun banyak perbedaan antara Indonesia dan Australia, Jenkins Affair sebaiknya segera berakhir (Dugis). Namun dalam hal ini tidak membuat hubungan antar kedua negara tersebut menjadi terputus, tetapi ada upaya dari kedua belah pihak agar menyelesaikannya dengan cepat.

Di tengah dinamika hubungan bilateral Indonesia Australia, kerjasama dalam berbagai bidang telah banyak disepakati oleh kedua negara. Misalnya perjanjian celah timor tahun 1989 mengenai pemanfaatan minyak dan gas laut Timor pada perbatasan Timor timur dan Australia. Kedua negara juga tergabung dalam APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) yang bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi dan penanaman modal di kawasan Asia Pasific. Dalam bidang pertanian, Indonesia merupakan negara mitra terbesar bagi Australia dalam Australian Centre for International Agricultural Research's (ACIAR). Sementara dalam bidang keamanan Australia dan Indonesia menjalin kerjasama dalam Counter of Terrorism (CT). Dalam bidang pendidikan sudah tak diragukan lagi. Saat ini ribuan mahasiswa Indonesia belajar di Australia dimana sebagian besar di antara mereka menerima

beasiswa dari pemerintah Australia (Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, 2014).

Indonesia dan Australia juga terikat dalam *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (2005) serta *Lombok Treaty* (2006). Deklarasi *Comprehensive Partnership* memuat *road map* bagi pengembangan hubungan bilateral ke depan (*expand and deepen*) antara Indonesia dan Australia melalui forum-forum konkrit seperti IAMF (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*). Sementara itu, *Lombok Treaty* memuat prinsip-prinsip penting, seperti penghormatan terhadap kedaulatan nasional, integritas wilayah serta komitmen kedua negara untuk tidak membiarkan wilayah masing-masing dijadikan sebagai *staging point* untuk mengusung tujuan separatisme.

Program bantuan luar negeri Pemerintah Australia telah membantu meningkatkan taraf kehidupan jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Program bantuan ini mendukung kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Australia dan Indonesia telah bermitra dalam pembangunan lebih dari 60 tahun. Kerjasama pembangunan Indonesia-Australia telah tertuang pada Country Strategy Framework (CSF) 2008–2013 berjumlah A\$ 2,5 milyar (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2014). Menjaga kemitraan ini sangatlah penting bagi Australia. Luasnya wilayah Indonesia serta kedekatan jaraknya dengan Australia menjadikan peningkatan kesejahteraan, stabilitas dan pertumbuhan di Indonesia amat penting bagi kedua negara sekaligus kawasan.

Hal tersebut di atas menjadi peluang untuk mencari terobosan baru dalam bidang ekonomi yang dapat menjadi perekat hubungan kedua negara. peluang kerjasama Indonesia-Australia juga masih terbuka lebar dalam bidang ekonomi, social-budaya, pendidikan dan sebagainya. Semua ini tentunya bukan hanya demi kemitraan strategis kedua negara melainkan juga untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran dunia atau *a better and prosperous world*.

B. Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Persepsi dalam masyarakat dan pemerintahan Australia terhadap Indonesia pada umumnya tetap menganggap bahwa Indonesia adalah ancaman potensial yang mengancam eksistensi masyarakat Australia. Setidaknya sikap masyarakat Australia senantiasa menunjukkan kewaspadaan. Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Ian McAlister pada tahun 1991 menunjukkan bahwa 20% rakyat Australia menganggap rakyat Indonesia merupakan ancaman bagi keamanan Australia yang beranggapan demikian (Aulia, Kebijakan Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd Dalam Menjaga Hubungan Bilateral Indonesia-Australia, 2008).

Australia sangat menaruh perhatiannya terhadap negara tetangga yang berada disebelah utara yaitu negara Indonesia, terlihat dari secara presentasi yang terus meningkat. Hal tersebut memang wajar, sebab secara teoritis kedua negara yang bersebelahan biasanya memiliki konflik yang tinggi, apalagi antara Indonesia dengan Australia memiliki perbedaan yang bertolak belakang dalam hal latar belakang sejarah, ras dan budaya.

Australia adalah tetangga terdekat Indonesia selain Singapura, Malaysia ataupun Thailand, ia juga merupakan negara demokrasi terdekat dengan negara kita. Tidak ada negara ketiga yang lebih dekat dengan Australia selain Indonesia itu sendiri. Baik Papua Nugini dan Timor-Timur yang baru saja melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Australia memandang Indonesia sebagai “tetangga raksasa”. Hal ini mengandung beberapa unsur kebenaran, antara lain karena jumlah penduduk Indonesia yang sepuluh kali lipat lebih besar dari pada penduduk Australia, disamping itu dilihat dari segi potensi kekayaan alamnya, Indonesia bisa tumbuh jauh melebihi Australia dalam hal kekuatan ekonomi dan kemakmuran (Aulia, 2008, pp. 28-29).

Walaupun bertetangga dekat, Indonesia dan Australia tidak memiliki pertalian yang sungguh-sungguh akrab. Indonesia sebenarnya sangat ingin bersahabat dengan Australia, tetapi karena kewaspadaan Australia terhadap Indonesia terlalu berlebihan sehingga keduanya belum saling mengenal dengan baik satu sama lain, untuk saling mengerti yang lebih mendalam, padahal keduanya sangat berbeda sebagai bangsa dan segi budaya.

Australia memiliki pers yang bebas. Tetapi mungkin tidak sebebaskan Amerika Serikat, namun cukup bebas dalam mengecam secara tajam. Dan mereka tidak mengerti dan tidak mau mengerti apa yang dimaksud “bebas bertanggung jawab”. Tuan Peter Rodgers yang pernah mendapatkan anugrah *Australian Journalist of the Year Award* pada tahun 1979, ia menulis dan memotret lalu mempublikasikan berita-berita mengenai Timor-Timur secara bebas tetapi kurang bertanggung jawab sehingga membuat para pejabat Indonesia menjadi berang.

Seorang wartawan lain dari The Sidney Morning Herald, Peter Hastings menulis bahwa ada pejabat Indonesia yang mengatakan kepadanya : *Australia is nothing more than an appendix in the abdominal cavity of southeast Asia. One can live without it and usually only becomes aware of it when it hurts* (Australia bagaikan usus buntu dalam rongga perut Asia Tenggara, tidak adapun tidak apa-apa dan baru tersa kehadirannya kalau menimbulkan rasa sakit) (Aulia, 2008, pp. 29-30).

Hal itu memang ada benarnya juga, kalau sakit usus buntu itu semakin parah maka dapat mematikan, tetapi jika dipelihara dengan baik-baik maka usus buntu itu tidak akan menimbulkan masalah. Banyak warga Indonesia yang menuntut ilmu di Australia, mencari nafkah, menjadi penduduk resmi, ataupun imigran gelap.

Seorang komentator politik di Canberra mengatakan, “*sebagai negara berdaulat, sebenarnya baru pada pemerintahan George Whitlam lah kita ini punya politik luar negeri sendiri, sebelumnya kita ini hanya mengikuti kemauan Washington dan London*”. Memang, ketika kasus Timor-Timur memanasi, pada 6 September 1975 di parlemen Australia meletus debat tentang Timor, ada juga yang ikut senang dengan kecemasan masyarakat Australia terhadap “Invasi Militer Australia”, yakni kalangan Hankam Australia serta kepentingan industri yang mendukungnya. Seorang pengamat Australia mengatakan kepada *Tempo*, asu itu mereka jadikan “dongkrak” untuk menaikkan anggaran pertahanan Australia yang ditekan oleh Partai Buruh, sambil mencegah rencana Indonesia meminta tambahan bantuan langsung dari Amerika, seperti yang diketahuisegala bantuan blok Barat untuk Indonesia, diberikan melalui Australia

berupa pesawat pancargas *Sabre* rakitan (asembling) Australia. Jenis pesawat itu sendiri sudah ketinggalan zaman di Australia pada waktu itu.

Disamping itu ada bantuan yang masih terikat pada Australia, yakni tidak boleh digunakan untuk operasi keluar negeri dan dimaksudkan untuk menjaga kamtib dalam negeri Indonesia. Pernyataan serupa juga dituntut Amerika Serikat, namun Whitlam tetap tidak beranjak dari politik damai. Malahan ketika pertempuran dengan Dili sedang hangat-hangatnya pada bulan Agustus 1975, beliau mengumumkan sikap Partai Buruh yang ingin menutup basis-basis AS di Australia dan juga menolak rencana pangkalan Amerika di pulau Gracia. Sekaligus ia menolak kehadiran adikuasa manapun berada di Samudera Indonesia. Tidak berhenti disitu saja, kekuatan Angkatan Udara dipreteli sedikit dengan mendaratkan sebagian besar pesawat pembom jarak jauh F-111 yang “cacat kompresornya”. Selain itu pucuk pimpinan organisasi intel ASIO, yang dikabarkan pernah menyelundupkan senjata untuk RMS pada tahun 1952, segera diambil alih oleh Whitlam sendiri yang selanjutnya menyerahkannya pada kejaksaan (Philips Kitlay, 1989, p. 73)

Diplomasi *Sabre* yang dilakukan Whitlam merupakan sebuah itikad baik kearah pemulihan hubungan antara kedua negara. Kendati demikian, politik Whitlam pun ada batasnya. Sebab meskipun secara resmi memproklamasikan politik non intervensi terhadap Timor, Australia dan sekutu-sekutu baratnya pasti lebih senang jika Timor dan Dili tercipta sebagai negara baru yang pro Barat. Keberanian dan langkah politik Whitlam ada batasnya, ia di bebas tugaskan oleh Gubernur Jenderal John Kerr karena langkah politiknya sendiri. Tetapi John Kerr (yang menjadi

Gubernur Jenderal atas usulan pemerintah Whitlam) memiliki alasan lain mengapa dia membebaskan tugasannya Whitlam. Menurutnya, “Whitlam berdasarkan konstitusi tidak mampu mengusahakan berlangsungnya pelaksanaan keuangan negara”.

Beberapa jam kemudian, John Kerr mengangkat Malcolm Fraser menjadi Perdana Menteri dengan syarat membentuk kabinet secepatnya, tidak berhak mengadakan pemecatan atau pengangkatan, tidak boleh merencanakan kebijaksanaan apapun kecuali menjalankan keuangan negara menjadi lancar sampai dengan pemilihan umum (Philips Kitlay, 1989, p. 76)

Setelah selesai mengucapkan sumpahnya Perdana Menteri Fraser kabarnya sempat mengirimkan pesan kepada Presiden Soeharto, dengan harapan agar penyelesaian Timor-Timur bisa tercapai sesuai “yang dirasakan pantas bagi kepentingan Indonesia”. Bagi Indonesia ini dipandang sebagai “lampu hijau” bagi kedaulatan Indonesia terhadap Timor-Timur. Tetapi didalam negeri maupun di forum internasional, Australia terus menerus menyarakan pendirian yang mengandung ketidak setujuan terhadap tindakan-tindakan Indonesia di Timor-Timur.

Timor-Timur secara resmi menggabungkan diri dengan Indonesia pada akhir bulan Juli 1975, tetapi menlu Australia, Peacock mengeluarkan pernyataan bahwa “Australia tidak menganggap bahwa persyaratan dekolonisasi telah terpenuhi” hal ini jelas tidak menguntungkan Indonesia.

Langsung mengakui bahwa Timor-Timur sebagai wilayah Indonesia juga tidak mudah bagi Fraser. Didalam negeri ia akan menghadapi golongan yang masih simpati terhadap Fretilin, “paling tidak

para wartawan Australia tidak begitu saja menerima sebelum soal hilangnya wartawan Australia di Timor-Timur pada 1975 menjadi jelas duduk perkaranya” kata sebuah sumber dikalangan pimpinan persatuan wartawan Australia di Canberra. Dalam hal ini jalan yang ditempuh Fraser ialah perlahan-lahan sehingga akhirnya tidak mempunyai pilihan selain mengakui Timor-Timur sebagai salah satu provinsi yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia (Philips Kitlay, 1989, pp. 82-85).

Namun demikian, dalam ketegangan suhu politik hubungan antara Indonesia-Australia terdapat segi positif bagi Indonesia. Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar kedua setelah Papua Nugini, yang mendapat bantuan sebesar 233,4 juta dollar Australia untuk tahun 1978-1979. Sedangkan Indonesia mendapat 68 juta dollar Australia untuk masa tiga tahun (1976-1979) dalam rupa bantuan proyek, bantuan pangan dan bantuan latihan. Sebagian besar bantuan tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek yang jumlahnya 29 juta dollar Australia untuk tahun 1978-1979 (Aulia, 2008, p. 33).

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, bagi Australia, faktor pertimbangan keamanan merupakan faktor terpenting yang melandasi hubungannya dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Selama ini diyakini bahwa masalah tersebut telah menjadi pertimbangan utama untuk pengambilan kebijaksanaan di bidang lainnya.

Pada masa pemerintahan Partai Buruh di bawah pimpinan PM Robert James Lee Hawke yang lebih dikenal dengan Bob Hawke (1983-1991) dan PM Paul Keating (1991-1996) kepentingan nasional Australia terdiri dari dua hal pokok, yaitu menjaga

keamanan fisik negaranya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Kedua kepentingan nasional Australia tersebut amat berkaitan dengan keamanan dan kemakmuran kawasan Asia Pasifik. Kepentingan nasional tersebut di implimentasikan kedalam kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, social, budaya, dan pertahanan keamanan domestik maupun luar negeri.

Pemerintahan Buruh Australia telah merumuskan empat prioritas utama dalam politik luar negerinya, seperti yang diuraikan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Senator Gareth Evans yaitu :

1. Protecting Australia's security throught the maintenance of the positive security and strategic environment in our region.
2. Pursuing trade, Investment and economic cooperation.
3. Contributing to local security.
4. Contributing to the cause of good international citizenship.

PM Australia Bob Hawke juga telah mengumumkan secara resmi bahwa yang menjadi fokus dalam hubungan bilateral Australia adalah Indonesia dan Papua Nugini, sebab kedua negara tersebut adalah tetangga terdekat (Hardjono, 1992). Dan dalam kaitannya dengan Asia, PM Bob Hawke juga mengubah strategi keamanan dari “mencari keamanan dari Asia” menjadi “mencari keamanan di dalam Asia”. Ini berarti Australia telah mengubah persepsinya terhadap Asia yang dulu dipandang sebagai bahaya yang selalu mengancamnya, baik itu bahaya kuning (Jepang) maupun bahaya merah

(RRC), menjadi mitra keamanan dan kemakmuran bersama di Asia. Khususnya terhadap Indonesia, jika PM Bob Hawke dulu mengatakan bahwa “integritas teritorial”, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi Indonesia merupakan sumbangan yang sangat penting bagi keamanan Australia (ikrar Nusa Bhakti, 1996, p. 298).

Hubungan kerjasama keamanan Australia-Indonesia dimulai sejak tahun 1972 (Dafri, 1997). Yaitu dirintis pada waktu kunjungan PM Australia McMohan ke Indonesia dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto di dataran tinggi Deing. Sifat kerjasama Australia dalam bentuk Grand Aid (bantuan sepenuhnya) yang diberikan untuk jangka waktu setiap tiga tahun. Dalam kaitannya dengan ABRI kerjasama ini meliputi, untuk TNI-AD, proyek DART di gunung Bohong, Cimahi, Prefab rumah untuk kompi (Irian Jaya). Sedangkan untuk TNI – AL, pesawat-pesawat NOMAD dan Darmaga Tanjung Uban kapal-kapal dan sebagainya, sedangkan untuk TNI-AU, proyek *Sabre*, kemampuan *engine repair* dan *engine test cell* untuk Alison T-56 serta proyek *Soloy (reening bell Sioux dengan motor Alison 250-C30)* dan sebagainya. Selain itu bantuan Australia untuk TNI-AD juga meliputi pengiriman personil untuk dididik dalam berbagai lapangan /jurusan di Australia akan tetapi kerjasama itu tidak selalu berjalan lancar karena ada saja yang menghambat hubungan kedua negara, terutama jurnalis-jurnalis Australia yang sering memberikan publik opini kepada rakyat.

Ditengah sikap pemerintah Australia yang positif itu, terkadang pers Australia ternyata bersikap berbeda, seperti kasus tewasnya lima orang wartawan Australia ketika sedang meliput perang di Timor-

Timor pada tahun 1975. Didukung oleh gerakan rakyat Timor-Timur pro kemerdekaan yang berada di Australia. Sikap kritis itu berwujud menjadi berbagai pemberitaan yang bernada minor dan sinis terhadap Indonesia. Kasus lainnya tentang tulisan David Jenkins yang dimuat di harian The Sidney Morning Harold yang memberitakan tentang kekayaan Presiden Soeharto, keluarga dan Kerabatnya. Sementara itu Pemerintah Australia tidak bisa mencegah hal tersebut karena sistem politik Australia menghargai kebebasan pers. Selain itu masalah Irian Jaya dengan Papua Nugini juga menjadi sasaran kritik pada pertengahan 1980-an dan yang dijadikan alasan adalah larinya 12 ribu warga Irian Jaya ke Papua Nugini atas hasutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Wanandi, 1992, p. 423). Menlu Australia Bill Hayden dalam pidatonya di Universitas Papua Nugini di Port Moresby mengatakan, OPM merupakan penyebab utama meningkatnya pelintas batas dari Irian Jaya. Karena mereka ditakut-takuti oleh organisasi ini. Kemudian dilontarkan juga tuduhan bahwa mereka sedang dianiaya oleh pemerintah Indonesia sendiri. Tetapi karena hubungan tersebut dapat distabilkan kembali oleh Indonesia dan sebagian dari pelintas batas tersebut dapat dipulangkan kembali ke Indonesia maka isu tersebut tidak melebar dan hubungan kedua negara tetap membaik.

Kemudian “awan cerah” tersebut kemudian menjadi “gelap” ketika pada tanggal 12 November 1991, terjadi peristiwa Santa Cruz. Lebih dari seratus orang tewas ditangan aparat militer Indonesia yang membunuh sekumpulan orang yang sedang berdemonstrasi setelah mengikuti upacara pemakaman seorang mahasiswa yang terbunuh oleh polisi di Dili, Timor-Timur. Peristiwa tersebut memicu protes dari masyarakat Internasional. (Aulia, 2008, p. 37). Pada

umumnya Australia dibawah PM Paul Keating memandang bahwa kasus Santa Cruz tersebut adalah masalah domestik Indonesia. Tetapi hal ini dijadikan momentum besar bagi pers dan pejuang kemerdekaan Timor-Timur di Australia. Mereka menggalang *opini public* secara besar-besaran dan semakin kritis untuk menekan Indonesia dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Isu ini dimanfaatkan oleh John Howard untuk memenagkan perebutan kursi Perdana Menteri. Howard memiliki perspsi yang berbeda, dia memandang bahwa dalam kasus Santa Cruz, Indonesia tidak melakukan pelanggaran HAM yang berat.

Peristiwa Santa Cruz merupakan persoalan domestik Indonesia sehingga dalam pandangan Indonesia segala bentuk intervensi asing tidak diperkenankan didalamnya. Meskipun insiden ini menimbulkan reaksi yang cukup keras dari berbagai negara, terutama Portugal. Walaupun demikian, sikap resmi pemerintah Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Timur, bahkan pada tahun 1980 Indonesia dan Australia memprakarsai berdirinya Organisasi OPEC dan dibentuknya ASEAN Regional forum (ARF) pada tahun 1993. Hubungan kedua negara memang pada kenyataannya naik turun tetapi tidak dapat dipungkiri hubungan positif lebih banyak mendominasi hubungan kedua negara, khususnya dibidang pertahanan dan keamanan.

Puncak antara kerjasama pertahanan keamanan antara Australia dan Indonesia terjadi pada tanggal 18 Desember 1995, ketika Indonesia – Australia menandatangani persetujuan Pemeliharaan Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan akan berdampak positif bagi hubungan kedua negara serta stabilitas keamanan regionalnya. Kerjasama Pertahanan dan Keamanan tersebut terutama sekali

difokuskan pada upaya peningkatan *Confidence and Security Building Measure* (Dwiyanto, 1996, p. 182)

C. Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Pemerintahan Pasca Reformasi

Jatuhnya rezim orde baru di Indonesia pada tahun 1998 digantikan rezim reformasi juga diwarnai dengan pasang surutnya hubungan bilateral Indonesia-Australia. Peristiwa bom Bali yang juga banyak menelan korban yang merupakan warga negara Australia membuat pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab dan menemukan pemboman tersebut. Kebijakan yang langsung diambil pemerintah Australia sesaat setelah terjadinya pemboman tersebut adalah dengan mengeluarkan travel warning kepada warga negaranya untuk tidak melakukan perjalanan ke Indonesia. Namun dalam kepemimpinan yang selalu beganti pasca reformasi tentu ada beberapa kebijakan yang berbeda-beda antara hubungan Indonesia-Australia.

Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan B.J Habibie paktis tidak mengalami banyak perubahan, karena pada saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri luar negeri Ali Alatas yang juga telah menjabat sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto.

Pemerintah Indonesia dibawah presiden B.J Habibie, tekanan internasional sedemikian gencar, PM Australia Jhon Howard menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar diadakan jajak pendapat dan berakhir dengan lepasnya Tim-tim pengakuan wilayah Republik Indonesia. Isu HAM kadang dimunculkan kembali yang terakhir meniupkan terorisme dengan ditunjang dana besar serta dukungan AS dan sekutunya, membuat isu baru tentang islam

melalui gerakan-gerakan yang dituduhkannya sebagai gerakan terorisme, mereka dalam program jangka panjangnya menempatkan islam lebih berbahaya dari komunis.

Upaya menyudutkan pemerintah Indonesia yang dianggap dengan nafas islam semakin kencang, Australia melakukan tindakan keji dan memalukan layaknya tindakan penjahat kambuhan, memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta (mirkasan, n.d.).

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid kebijakan luar negeri adalah yang paling mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak terutama dari kalangan politikus, dengan seringnya kegiatan perjalanan diplomatik yang dilakukan Abdurahman Wahid, sementara masih banyak permasalahan dalam negeri yang belum terselesaikan antara lain tuntutan demokratisasi, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, ancaman separatisme, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Seringnya presiden Abdurahman Wahid mengadakan kunjungan diplomatik, sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan investasi asing yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia juga sebagai upaya untuk meminta dukungan negara-negara asing dalam mengenai konflik, serta mempertahankan integritas teritorial Indonesia (Nainggolan, 2001, p. 5)

Presiden Abdurahman Wahid juga berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Australia yang renggang akibat permasalahan Timor Timur. Australia sebenarnya menjadi tempat kunjungan presiden, sehingga mendapat respon positif

dari pihak Australia. Namun kunjungan yang dimaksud tertunda sampai beberapa kali sehingga meninggalkan kesan kalau Indonesia kurang memperhatikan hubungannya dengan Australia terutama dengan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintahan Abdurahman Wahid dengan usaha membina hubungan-hubungan baru dengan berbagai negara, namun tanpa rencana yang terumuskan dengan jelas (Nainggolan, 2001, p. 85). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hubungan Indonesia-Australia terus memanas sejak permasalahan Timor timur. Faktor yang menyebabkan kedua negara masih terjalin hubungan bilateral adalah kedekatan geografis dan kedekatan menjaga secara bersama keamanan daerah perbatasan (Hariyadi, 2001, p. 218). Meskipun demikian, presiden Abdurahman Wahid tetap memberikan perhatian kepada Australia. Bahkan presiden Abdurahman Wahid mengemukakan gagasan untuk dialog bagi negara-negara dikawasan pasifik barat daya yang disambut baik oleh Australia (Hariyadi, 2001, pp. 207-209)

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sejak tahun 2001 hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dapat dikatakan masih dingin. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya sejarah masa lalu di tahun 1999 yaitu ketika Australia ikut campur tangan atau intervensi dalam penyelesaian masalah Timtim. Intervensi yang dilakukan Australia tersebut tentu saja merusak hubungan bilateral dengan Indonesia apalagi dalam membela tindakannya di Timtim, Australia memposisikan diri sebagai wakil Amerika Serikat di Asia (Aleksius, 2006)

Pemerintah Megawati berupaya untuk membangun dan menciptakan peran masyarakat Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional,

yang berorientasi pada pencapaian kepentingan nasional sebagai upaya untuk memulihkan citra dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU) dan Latihan Kakadu, Latihan Cassoary, Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patrol dan pesawat Nomad (TNI AL). Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DPC kecuali program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia 2001. Selanjutnya kerjasama pertahanan kedua negara kembali membaik, seperti dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan Dephan, angkatan bersenjata dan satuan angkatan bersenjata kedua negara. Selain dialog strategis pertahanan, beberapa kegiatan bersama lainnya adalah penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian (Mimbarno, 2017)

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memprioritaskan isu terorisme dan juga lebih meningkatkan kerjasama kontra-terorisme terutama dengan Australia yang dilakukan dengan membuat kebijakan kontra-terorisme baru untuk menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan adanya kebijakan kontra-terorisme yang baru antara Indonesia dengan Australia diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis diantara

keduanya. Berikut ini beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia selama masa pemerintahan SBY seperti yang dilakukan pada Februari 2005 bersama dengan pemerintah Australia dan Indonesia membangun suatu program bantuan untuk meningkatkan pengembangan intelijen serta kemampuan dan pengawasan untuk menjaga keamanan pelabuhan Indonesia.

Selain itu mulai terdapat persetujuan tentang pengaturam dalam kerjasama Indonesia-Australia yang berupa *Aviation Security Capacity Building Project* yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2005. Kerjasama tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah masuknya para pelaku teroris ke Indonesia melalui jalur laut maupun daratan yang melewati perbatasan. Begitu juga dengan adanya pertemuan bilateral yang dilakukan pada 3-6 April 2005 (Wise, 2005) Dalam perjalanannya, hubungan kedua negara telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di kedua negara. Indonesia adalah negara yang penting bagi Australia, begitu juga Indonesia. Situasi demikian membuat kedua negara harus menciptakan suatu kemitraan yang sehat.

D. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Investasi

Dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara Indonesia dan Australia tentu dalam hal ini dilakukan kerjasama-kerjasama antar kedua negara tersebut guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, Australia memiliki kepentingan yang cukup besar di bidang ekonomi di Indonesia. Hubungan Australia dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi dan tidak jauh

pula dari masalah politik. Oleh karena itu, peranan Australia yang semakin aktif di dunia internasional dapat digunakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertimbangkan hubungan antara Indonesia - Australia, dimana dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan peranannya di badan-badan organisasi multilateral.

Hubungan perdagangan antara Australia dan Indonesia pun telah lama terjalin Berikut dasar hubungan kerjasama perdagangan Indonesia dan Australia:

1. *Trade agreement between the Republic of Indonesia and the Commonwealth Australia*, Nota persetujuan dagang (No. Agenda 346), Canberra tanggal 14 November 1972.
2. *Exchange of Letters between the Government of Republic of Indonesia and Government of Australia*, Jakarta 10 November 1968
3. *Trade Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Commonwealth Australia* yang diratifikasi melalui kepres No.6 Tahun 1973 Tanggal 27 Februari 1973
4. *Agreement Concerning the protection and enforcement of Copyright* yang ditandatangani di Jakarta Tanggal 17 November 1992
5. *Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Governement of Australia for Avodance of Double Taxation and the Prevention of*

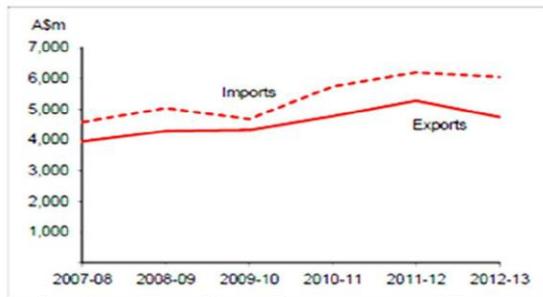
- Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income*, di Jakarta tanggal 22 April 1992
6. *Agreement Between the Government Republic of Indonesia and the Governement of Australia Concerning the Promotion and Protection of Investments*, diratifikasi melalui keppres No. 36 Tahun 1993 Tanggal 15 Mei 1993
 7. *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia on Technical Cooperation in Financial Sectors*, Canberra 23 September 1996
 8. *Umbrella MoU Concerning Food Inspection and Certification Systems* yang ditandatangani di Bali Tanggal 24 Februari 1999
 9. *Memorandum of Understanding between Department of Asian Relations and Trade of the Northern Territory of Australia and the Directorate General of Customs and Excise of the Department of Finance of the Republic of Indonesia on A Customs Facility in Darwin for Goods Shpped to Indonesia Ports other than in Java and Sumatera*, Bali 8 Juni 2001
 10. *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on Collaborative Animal and Plant Health and Qurantine Activities*, Medan 29 Juli 2003
 11. *Join Ministerial Statement Australia-Indonesia Ministerial Forum and Australia Indonesia Development Area*

Ministerial Meeting, Canberra 18 Maret 2005

12. *Trade and Investment Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, Vientiane 29 September 2005 (ISTIQUAMAH, 2014).*

Indonesia merupakan mitra strategis Australia dari segala aspek baik politik, ekonomi, sosial maupun keamanan. Dalam traktat Lombok, Indonesia dan Australia mengukuhkan hubungan bilateralnya dalam kerjasama kemitraan strategis dan keamanan. Kemitraan strategis antara Indonesia-Australia melalui sektor perdagangan yaitu ekspor impor. Indonesia mengimpor tepung terigu, kedelai, dan produk olahan sapi dari Australia sedangkan Australia mengimpor minyak dari Indonesia.

Tabel 2.1 Nilai Ekspor Indonesia dan Australia



Sumber: Fact Sheet Department of Foreign Affairs, 2013

Perkembangan perekonomian dan perdagangan Australia:

1. Total perdagangan Australia periode Januari-Maret 2013 tercatat sebesar US\$ 118,25 miliar, atau turun 3,36% dibandingkan periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 122,36 miliar. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor sebesar US\$ 61,23 miliar, atau turun 0,20% dibanding periode yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar US\$ 61,36 miliar, dan impornya sebesar US\$ 57,02 miliar, atau turun 6,53% dibanding periode yang sama tahun 2012. Neraca perdagangan Australia pada periode ini, menunjukkan surplus sebesar US\$ 4.210,92 juta, atau meningkat sebesar 1.105,18% dibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 349,40 juta.
2. Perkembangan beberapa komoditi ekspor Australia ke Dunia terbesar periode Januari-Maret 2013, yang meningkat nilai ekspornya, dibanding periode yang sama tahun 2012, antara lain :
 - Iron Ores & Concentr : Incl Roasted Iron {HS 2601), sebesar US\$ 15,88 miliar, meningkat 15.25% dibanding periode yang sama tahun 2012:
 - Gold (incl. Gold Plated W platinum) Unwrought Or In (HS 7108). Sebesar US\$ 3.83 miliar (12,81%)
 - Wheat And Meslin (HS 1001), sebesar US\$ 2,00 miliar (14.14%):
 - Artificial Coromdum. Whether or Not Chemically (HS 2818), sebesar US\$ 1,34 miliar (2.37%):
 - Copper Ores and Concentrates (HS 2603), sebesar US\$ 1,25 miliar (9,36%):

- Rape Or Colza Seeds, Whether Or Not Broken (HS 1205) sebesar US\$ 0,88 miliar (46,77%);
 - Meat Of Bovine Animals. Frozen (HS 0202) sebesar US\$ 0,71 miliar (10,93%)
3. Sementara , yang mengalami penurunan nilai ekspor antara lain komoditi :
- Coal; Briquettes; Ovoids and Similar Solid Fuels Man (HS 2701), dengan nilai ekspor sebesar US\$ 9,04 miliar, turun 19,27% dibanding periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 11,20 miliar;
 - Country Specific Special Provisions (HS 9999), sebesar US\$ 1,28 miliar (-1,21%);
 - Unwrought Aluminium (HS 7601), sebesar US\$ 0,54 miliar (-12,66%).
4. Perkembangan beberapa komoditi impor Australia dari Dunia terbesar periode Januari-Maret 2013, yang meningkat nilai impornya, dibanding periode yang sama tahun 2012, antara lain adalah :
- Motor Vehicles Princ Designed For Transp Of Persons (HS 8703), dengan nilai impor sebesar US\$ 4,49 miliar, atau meningkat 8,35% dibanding periode yang sama tahun 2012;
 - Electrical Apparatus for Line Telephony (HS 8517), sebesar US\$ 1,65 miliar, meningkat 1,85%;
 - Automatic Data Processing Machines & Units Thereof (HS 8471), sebesar US\$ 1,64 miliar, meningkat 5,94%.
 - Medicaments (Except Vaccines, etc.) (HS 3004), dengan nilai impor sebesar US\$

2,02 miliar, turun 8,40% dibanding periode yang sama tahun 2012;

- Motor Vehicles For The Transport Of Goods (HS 8704), sebesar US\$ 1,75 miliar, turun 13,02%.

5. Ekspor Australia pada periode ini, terbesar ditujukan ke China, Jepang, Korea Selatan India dan Amerika Serikat, dimana hanya ekspor ke China yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, yaitu sebesar 18,10% . Sementara itu, ekspor ke Jepang, Korea Selatan, India dan Amerika Serikat mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,86% ; 9,97% ; 25,41% dan 10,29%. Pada periode ini, Indonesia merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke 11, dan merupakan negara asal terbesar ke 12, bagi Australia.

Perkembangan perdagangan bilateral Australia dengan Indonesia:

1. Total perdagangan Australia dengan Indonesia periode Januari-Maret 2013 mencapai US\$ 1.963,12 juta, turun sebesar 7,53% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, sebesar US\$ 2.123,00 juta. Total perdagangan tersebut, terdiri dari ekspor Australia ke Indonesia sebesar US\$ 587,11 juta, turun 22,91% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 761,59 juta, dan Impor Australia dari Indonesia sebesar US\$ 1.376,01 juta, naik 1,07% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 1.361,41 juta. Sehingga, pada periode Januari-Maret 2013 ini, Australia mengalami defisit dalam neraca perdagangan luar negerinya dengan Indonesia, sebesar US\$ 788,90 juta.

2. Beberapa komoditi impor Australia dari Indonesia, pada periode Januari-Maret 2013 antara lain adalah :

- Gold (Incl Plat Plated), Unwrought (HS 7108) sebesar US\$ 109,27 juta, atau turun sebesar 47,66% dibanding periode yang sama tahun 2012;
- Wood, Continously Shaped (Tongued, Grooved,etc.,) (HS 4409), sebesar US\$ 26,37 juta, turun 43,69%;
- New Pneumatic Tyres of Rubber (HS 4011), sebesar US\$ 26,04 juta, turun 18,39%;
- Furniture Nesoi and Parts Thereof (HS 9403) sebesar US\$ 9,80 juta, turun 0,79%;
- Plywood, Veneered Panels & Similar Laminated Wood (HS 4412) sebesar US\$ 7,14 juta, turun 21,23% (Laporan ITPC Sydney, 2013)